

STUDI DIAGNOSIS PERMASALAHAN INTERAKSI MASYARAKAT DAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN MANGROVE CILACAP

Oleh

Tutut Sunarminto¹⁾
Leti Sundawati²⁾

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Hutan mangrove Cilacap merupakan hutan mangrove terluas di Jawa, luasnya 21.500 Ha (43,00 persen luas hutan mangrove di Jawa). Saat ini kelestarian hutan mangrove Cilacap sangat terancam, di antaranya oleh sedimentasi, mengingat letaknya yang dekat dengan muara sungai yang menghanyutkan bahan erosi, misalnya sungai Citanduy (Soerianegara dkk [redaksi], 1987 : 65-66). Sedimentasi membawa akibat peninggian dasar tanah. Di bagian belakang hutan mangrove menjadi kering (muncul tanah timbul), sedangkan di bagian depan tumbuh ke arah laut. Keadaan ini menjadikan bagian yang menjadi kering "diserobot" masyarakat.

Pada kenyataannya tidak mudah "mengambil kembali" lahan-lahan yang semula merupakan kawasan hutan dan telah dikonversi oleh masyarakat menjadi lahan-lahan pertanian atau pemukiman. Untuk mengatasi hal ini, Perhutani mengupayakan suatu jalan kompromi melalui suatu program yang disebut *social forestry* (Perhutanan Sosial [PS]) yang dilakukan secara terencana mulai tahun 1988 di KPH Sub Cilacap. Sebagai suatu program baru, diperlukan penelaahan seksama, khususnya mengenai berbagai permasalahan tujuan proyek untuk mengurangi sampai menghentikan kegiatan penyerobotan lahan di kawasan hutan oleh masyarakat yang "lapar lahan" dan secara tradisi berinteraksi erat dengan hutan dapat dicapai dengan baik.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- (1) mengetahui interaksi masyarakat dengan hutan mangrove beserta riwayat eksploitasinya,
- (2) mengetahui dan menelaah mekanisme keberadaan dan pelaksanaan proyek PS,

1) Staf Pengajar pada Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan - Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

2) Staf Pengajar pada Jurusan Manajemen Hutan - Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

- (3) mempelajari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek PS, dan
- (4) mengetahui dan menelaah tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek PS di kawasan hutan mangrove Cilacap.

METODE PENELITIAN

Desa Sidaurip (Kecamatan Gandrungmangu) dan Desa Rawa Apu (Kecamatan Kedungreja), Kabupaten Cilacap yang termasuk wilayah BKPH Rawa Barat, KPH Sub Cilacap, dipilih sebagai lokasi penelitian. Desa Sidaurip masuk wilayah RPH Ciawilayan, sedangkan Desa Rawa Apu masuk wilayah RPH Rawa Apu.

Waktu penelitian dibagi dalam dua tahap, yaitu tanggal 7 - 25 Maret 1990 di Desa Sidaurip dan tanggal 28 Mei sampai 16 Juni 1990 di Desa Rawa Apu.

Penelitian studi kasus ini pengumpulan datanya dilakukan secara primer, yaitu langsung mengkonfirmasi dari responden dan informan; dan secara sekunder dengan mempelajari arsip instansi-instansi terkait.

C. Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Mangrove Cilacap

Sampai dengan tahun 1957 sekitar 4.000 Ha hutan telah dikonversi oleh masyarakat menjadi lahan sawah. Karena sulit untuk meminta kembali dari masyarakat, diputuskan untuk dilakukan "bagi hasil" dari hasil lahan tersebut antara masyarakat dan Jawatan Kehutanan. Keputusan ini semakin meningkatkan konversi hutan menjadi lahan persawahan.

Pada tahun 1981 atas usulan Pemda Kabupaten Cilacap keluar SK Mentan No. 420/KPTS/Um/1981 tanggal 15 Mei 1981 tentang pengeluaran kawasan hutan yang telah menjadi sawah dari kawasan hutan menjadi milik masyarakat. Luas lahan berdasarkan SK Mentan ini adalah 5.766,23 Ha yang tersebar di Kecamatan-kecamatan Kedungreja, Sidareja dan Gandrungmangu.

Proyek PS di KPH Sub Cilacap mulai dilakukan tahun 1988 di BKPH Rawa Barat dan Rawa Timur dengan luas lahan total 1.680,25 Ha (lihat Tabel Lamp. 5). Lokasi PS di BKPH Rawa Barat tersebar disemua RPH, yaitu Ciawilayan, Cisumur, Cikujang dan Rawa Apu, sedangkan di BKPH Rawa Timur hanya di RPH Cikonde.

Sistem pola tanam yang dipakai dalam proyek adalah pada tumpangsari jenis pohon kayu dengan tanaman padi sawah yang bertolak dari sistyem "surjan" (lihat Gambar lamp. 1). Pada mulanya jenis sungkai dipilih sebagai tanaman pokok kehutanan. Setelah diketahui hasilnya sangat buruk, diganti dengan jenis ketapang dan nyamplung. Ada juga tanaman pengisi, seperti randu, sukun dan jambu batu.

Tahun 1989 penanaman padi sawah dilakukan melalui intesifikasi khusus (Insus) dengan memberikan pupuk secara gratis dan lainnya seperti : bibit unggul, obat-obatan dan zat pengatur tumbuh (ZPT) secara kredit yang dikembalikan

setelah panen. Setiap pesanggem memperoleh lahan garapan seluas 0,18 Ha pada tahun 1988 dan 0,25 Ha untuk peserta tahun 1989.

Untuk membina dan memperlancar pelaksanaan proyek, pesanggem setiap petak hutan sekitar 20-25 orang dihimpun dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina oleh para Mandor Kehutanan dalam teknis tanaman pokok kehutanan dan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat untuk teknis tanaman padi sawah. Ada 48 Mandor Kehutanan dan 8 PPL di BKPH Rawa Barat.

D. Studi Kasus Peserta Perhutanan Sosial

Hasil penelitian menemukan fakta bahwa tidak semua pesanggem merupakan "penduduk asli", yaitu penduduk yang telah bermukim di desa penelitian sejak sebelum tahun 1981, yaitu sejak sebelum keluar SK Mentan tahun 1981. Sembilan responden (45 persen) di Desa Sidaurip merupakan pendatang. Tiga responden diantaranya menyatakan bahwa kepindahan mereka ke Desa Sidaurip karena mendapatkan lahan garapan (menjadi pesanggem) pada proyek PS. Dua diantaranya berasal dari desa yang sama dengan salah seorang Ketua KTH dan menyatakan bahwa segala sesuatunya mengenai kesertaan mereka dalam proyek diatur oleh Ketua KTH tersebut.

Hanya seorang responden di Desa Rawa Apu yang bukan penduduk asli. Responden ini menjadi penduduk Desa Rawa Apu pada tahun 1985, setelah menikah dengan seorang wanita warga Desa Rawa Apu.

Dari 20 responden pesanggem di Desa Sidaurip hanya 2 orang yang termasuk tunakisma lahan sawah dan 2 orang pemilik lahan sempit (0,01 - 0,024 Ha). Responden di Desa Rawa Apu sebagian besar tidak memiliki lahan sawah (14 orang = 70 persen) dan hanya 3 orang yang memiliki lahan sawah lebih dari 0,50 Ha (lihat Tabel Lamp. 7).

Dari data Tabel Lampiran 6 dan 7 tampak bahwa sekitar 58,94 persen hanya penduduk Desa Sidaurip tidak memiliki lahan sawah dan hanya 10 persen pasangan responden yang tergolong tunakisma. Hal ini menunjukkan responden pesanggem di Desa Sidaurip secara rata-rata memiliki kondisi sosial ekonomi lebih baik dari pada rata-rata keseluruhan penduduk Desa Sidaurip berdasarkan parameter pemilikan lahan.

Tabel Lampiran 8 menunjukkan pembagian lahan PS tidak sama luasnya untuk setiap pesanggem. Data ini juga menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan yang baru. Lebih lanjut, bila dilihat pesanggem yang mendapatkan bagian lahan yang cukup luas, adalah juga yang memiliki lahan sawah cukup luas, maka unsur pemerataan semakin jauh dari jangkauan. Dua responden pesanggem di Desa Rawa Apu yang mendapatkan bagian lahan lebih dari 2,00 Ha adalah memiliki lahan terluas, yaitu 1,50 dan 0,67 Ha.

Dalam hal peningkatan kesejahteraan dengan adanya proyek PS di Desa Sidaurip dan Rawa Apu ada suatu perbedaan hasil. Dengan memakai ukuran kesejahteraan dari tingkat

pendapatan per kapita per tahun setara beras dari Tabel Lampiran 9 dan 10 tampak adanya 4 rumahtangga miskin di Desa Sidaurip meningkat menjadi 1 rumahtangga cukup dan 3 rumahtangga kaya, sedangkan di Desa Rawa Apu hanya ada peningkatan 2 rumah tangga miskin menjadi dua rumahtangga cukup. Harga beras dalam hal ini ditetapkan Rp 500,00 per kg sesuai dengan harga beras yang umum dikonsumsi oleh penduduk di kedua desa penelitian.

E. Pembahasan

1. Kelangsungan Proyek Perhutanan Sosial

Keinginan Pemda Kabupaten Cilacap untuk menjadikan lahan areal PS seluas 2.600 Ha menjadi lahan milik sebagai bagian dari rencana pembangunan jaringan irigasi Citanduy Hilir merupakan salah satu pengancam kesuksesan proyek PS. Meskipun keinginan Pemda tersebut sifatnya masih rahasia, ternyata di lapangan sudah banyak diketahui masyarakat.

Pengaruh dari isu di atas adalah terjadinya kasus "jual-beli" lahan garapan (pindah tangan lahan garapan) di lahan PS yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan. Hal ini lebih banyak terjadi di Desa Rawa Apu dari pada di Desa Sidaurip.

Kalau isu di atas menjadi kenyataan, maka proyek PS yang dijalankan menjadi sia-sia. Lebih lanjut hasrat masyarakat untuk memiliki lahan persawahan dari menyerobot di kawasan hutan menjadi lebih besar. Dalam benak mereka, suatu saat juga asti lahan-lahan tersebut akan menjadi lahan milik karena akan diperjuangkan Pemda mengingat telah menjadi areal persawahan yang luas. Dalam hal ini, pemilikan lahan lebih dimungkinkan oleh para pemilik modal kuat di pedesaan. Karena mereka yang mampu membiayai pembukaan lahan di kawasan hutan dengan biaya yang tidak kecil.

Di Desa Rawa Apu ada dua mekanisme pemilihan pesanggem, yaitu para calon pesanggem mendaftarkan diri kepada atau diajak oleh tokoh masyarakat yang diajak oleh KRPH untuk menentukan pesanggem dan para calon pesanggem menghubungi seorang Polsustan yang merupakan penduduk setempat dan dipercayai oleh KRPH untuk menentukan pesanggem. Kelemahan sistem pertama adalah adanya beberapa tokoh masyarakat yang mencantumkan namanya dan keluarganya sebagai calon pesanggem. Ada diantara mereka yang tidak membutuhkan karena termasuk golongan "mampu" malahan mendapat bagian lebih besar, lebih dari 2 bagian. Cara kedua, terjadi penyimpangan besar di lapangan karena petugas yang diberi wewenang menyelewengkannya dengan "menjual" lahan garapan PS kepada calon pesanggem antara Rp 25 - 60 ribu per bagian (0,25 Ha).

Penyimpangan-penyimpangan di atas dapat diperkecil bila informasi mengenai proyek kepada masyarakat tersampaikan dengan baik dan utuh. Semua responden tidak mengerti tujuan penghutanan kembali kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat, yang diketahui adalah bahwa mereka boleh

memanfaatkan lahan PS untuk diambil hasilnya (padi dan buah-buahan) dengan kewajiban memelihara tanaman pokok kehutanan.

2. Tingkat Keberhasilan Proyek Perhutanan Sosial

Ada dua ukuran pokok untuk menentukan tingkat keberhasilan proyek PS, yaitu (1) peningkatan pendapatan penduduk sekitar kawasan hutan yang paling miskin dan (2) keberhasilan penghutanan kembali kawasan hutan yang rusak dan telah diusahakan oleh penduduk untuk lahan persawahan. Tabel Lampiran 6, 7, 9 dan 10 menunjukkan kriteria keberhasilan pertama tidak sepenuhnya tercapai. Hanya sebagian kecil dari responden di Desa Sidaurip yang tergolong penduduk paling miskin menurut ukuran pemilikan lahan sawah. Padahal hampir 60 persen KK di Desa Sidaurip tidak memiliki lahan sawah. Di samping itu hanya ada 2 rumahtangga responden dari 9 rumahtangga yang tergolong miskin meningkat menjadi "cukup" dengan adanya garapan lahan PS di Desa Rawa Apu.

Persiapan pelaksanaan proyek yang sangat singkat dan terburu-buru merupakan penyebab utama kurang berhasilnya proyek PS menjangkau sasaran. Hal ini diakui oleh para petugas di lapangan maupun pihak pimpinan Perhutani di tingkat Sub KPH sampai RPH.

Kondisi lahan garapan yang bervariasi di berbagai tempat memberikan variasi tingkan keberhasilan peningkatan pendapat para pesanggem. Lahan garapan di Desa Sidaurip lebih baik dari pada di Desa Rawa Apu. Lahan di Desa Rawa Apu lebih sering tergenang air pasang, sehingga kurang baik untuk lahan persawahan. Selain itu, pembinaan KTH di RPH Ciawilayan lebih baik dari pada RPH Rawa Apu. Hasil Insus hasil tanam 1989 - 1990 disajikan pada Tabel Lampiran 11.

Tingkat keberhasilan tumbuh tanaman pokok di RPH Ciawilayan berkisar antara 70-90 persen di setiap persil, sedangkan di RPH Rawa Apu hanya sekitar 30 persen. Keberhasilan yang berbeda ini tidak terlepas dari perbedaan motivasi dan semangat kerja para Mandor PS dan pesanggem di masing-masing RPH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keterlibatan Pemda dari tingkat kabupaten sampai desa dalam proyek PS terbatas pada koordinasi di atas meja dan pelaporan secukupnya. Dukungan Pemda dalam memper tahankan kawasan hutan yang ada kurang memadai.
2. Sifat interaksi masyarakat dengan kawasan hutan saat ini berbentuk kebutuhan masyarakat akan lahan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi lahan pertanian. Hal ini disebabkan tidak adanya alternatif lahan lain yang dapat diolah oleh penduduk yang semakin banyak dan lapangan kerja lain yang belum mampu dibuka oleh masyarakat.

3. Tujuan proyek untuk meningkatkan pendapatan penduduk sekitar kawasan hutan yang paling miskin tidak tercapai sepenuhnya karena (1) persiapan pelaksanaan proyek sangat singkat, (2) kondisi lahan garapan bervariasi dan (3) adanya penyelewengan-penyelewangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam penentuan pesanggem.
4. Pembinaan KTH untuk motivasi pesanggem dalam upaya penghutanan kembali kawasan hutan yang rusak belum berjalan baik, terbukti semua responden berpendapat lebih baik kawasan hutan dijadikan lahan persawahan.

Saran

1. Koordinasi antara Perhutani dan Pemda Kabupaten Cilacap hendaknya ditingkatkan sampai kepada penyamaan persepsi dan tujuan pengelolaan kawasan hutan, khususnya yang telah dijadikan areal proyek PS.
2. Pembinaan KTH ditingkatkan sampai kepada pemberian pengetahuan dan ketrampilan membuka peluang usaha di luar sektor pertanian agar keterkaitan kepada lahan pertanian menjadi berkurang, sehingga memperkecil peluang penyerobotan kawasan hutan.
3. Penentuan pesanggem untuk pelaksanaan proyek PS selanjutnya hendaknya melibatkan pengawasan yang lebih ketat dari jajaran BKPH untuk dapat menjangkau sasaran proyek lebih tepat. Untuk itu sanksi tegas perlu diberikan kepada petugas yang melakukan penyelewengan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, A.N. 1969. Kemungkinan Konversi Hutan Payau Cilacap Menjadi Persawahan. Skripsi Elektif. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Kantor Statistik Kabupaten Cilacap. 1988. Cilacap Dalam Angka 1988. Cilacap.
- Kartasubrata, Junus. 1987. Social Forestry Sebagai Alternatif dalam Menangani Masalah Perladangan Berpindah (Makalah Penunjang). Fakultas Kehutanan IPB, Rimbawan dan Swasta Kehutanan Indonesia. Bogor.
-
- _____ . 1986. Lokakarya Taman Nasional. Departemen Kehutanan dan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Soerianegara, I., dkk (Redaksi). 1987. Prosiding Seminar III Ekosistem Mangrove, Denpasar, Bali, 5 - 8 Agustus 1986. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Panitia Nasional Program MAB Indonesia. Jakarta.
- Wiersum, K. 1984. Developing Strategies for Social Forestry: A Conceptual Approach (Working Paper). Environment and Policy Institute East-West Center. Honolulu-Hawai.
- Wirjodarmodjo, H. dan Hamzah. 1982. Beberapa Pengalaman Perum Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Prosiding Seminar II Ekosistem Mangrove. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Tabel Lampiran 1. Luas dan Penggunaan Tanah di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrungmangu, 1990

Bentuk Penggunaan	Luas (Ha)		%	
1. Sawah :	517,6		40,81	
Irigasi 1/2 teknis		235,0		18,53
Irigasi sederhana		282,6		22,28
2. Pekarangan/bangunan	156,4		12,33	
3. Hutan Negara :	568,7		44,83	
Hutan Payau		155,7		12,27
Perhutanan Sosial		413,0		32,56
4. Lain-lain :	25,7		2,03	
Bengkok (sawah)		19,2		1,51
Titisara (tanah kering)		3,5		0,28
Jalan		2,3		0,18
Lapangan Olah Raga		0,7		0,06
Jumlah	1.268,4		100,00	

Sumber : Monografi Desa Sidaurip, 1990.

Tabel Lampiran 2. Jumlah Penduduk Desa Sidaurip Menurut Mata-pencaharian (Usia 10 tahun ke atas), 1990

Matapencaharian	Jumlah	
	Jiwa	%
1. Petani sendiri	1.824	41,51
2. Buruh tani	2.460	55,99
3. Pengusaha	8	0,18
4. Buruh industri	9	0,20
5. Buruh bangunan	6	0,14
6. Pedagang	45	1,02
7. Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	36	0,82
8. Pensiunan	6	0,14
Jumlah	4.394 [*])	100,00

Sumber : Monografi Desa Sidaurip, 1990

Keterangan :

) Angka ini lebih tinggi dari pada jumlah penduduk Desa Sidaurip 10 th ke atas (=4.319 jiwa, lihat Tabel 2).

Tabel Lampiran 3. Luas dan Penggunaan Tanah di Desa Rawa Apu, Kecamatan Kedungreja, 1990

Bentuk Penggunaan	Luas (Ha)	%
1. Sawah : Tadah hujan	406,64	24,84
2. Tanah Kering : Pekarangan/bangunan Tegalan/Kebun	38,30 125,09	2,37 7,74
3. Hutan Negara	1.016,60	62,88
4. Lain-lain (sungai, jalan, kuburan, dll.)	35,00	2,17
Jumlah	1.616,63	100,00

Sumber : Monografi Desa Rawa Apu, 1990

Tabel Lampiran 4. Jumlah Penduduk Desa Rawa Apu Menurut Mata-pencaharian (Usia 10 tahun ke atas), 1990

Matapencaharian	Jumlah	
	Jiwa	%
1. Petani sendiri	2.255	48,62
2. Buruh tani	1.865	40,21
3. Nelayan	12	0,26
4. Pengusaha	17	0,37
5. Buruh bangunan	104	2,24
6. Pedagang	275	5,93
7. Pengangkutan	34	0,73
8. Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	37	0,80
9. Pensiunan	5	0,11
10. Lain-lain	34	0,73
Jumlah	4.638	100,00

Sumber : Monografi Desa Rawa Apu, 1990

Tabel Lampiran 5. Luas Perhutanan Sosial di Cilacap

BKPH	Luas (Ha)		
	1988	1989	Total
Rawa Barat	694,25	906,30	1.600,55
Rawa Timur	-	79,70	79,70
Jumlah	694,25	986,00	1.680,25

Sumber : Laporan Hasil Kerja Perhutani
KPH Banyumas Barat, 1989.

Tabel Lampiran 6. Distribusi Pemilikan Lahan Sawah si Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, 1990

Kelompok Luas Lahan (Ha)	Pemilik Lahan		Pemilikan Lahan (%)
	KK	%	
Tidak Memiliki	699	58,94	0
0,01 - 0,24	286	24,11	19,92
0,25 - 0,49	91	7,67	18,66
0,50 - 0,99	71	5,99	23,20
1,00 - 1,99	28	2,36	15,58
2,00	11	0,93	13,30
KK Desa lain	127	-	9,34
Jumlah	1.186*)	100,00	100,00

Sumber : Dihitung dan Diolah dari Data Letter C Desa Sidaurip, 1990

Keterangan : *) Tidak termasuk KK desa lain.

Tabel Lampiran 7. Distribusi Pemilikan Lahan Sawah Responden Pesanggem Desa Sidaurip dan Rawa Apu

Kelompok Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Responden Pesanggem			
	Desa Sidaurip		Desa Rawa Apu	
	KK	%	KK	%
Tidak memiliki	2	10	14	70
0,01 - 0,24	2	10	1	5
0,25 - 0,49	6	30	2	10
0,50 - 0,99	7	35	2	10
1,00 - 1,99	3	15	0	0
2,00	0	0	1	5
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : Data Primer

Tabel Lampiran 8. Distribusi Pembagian Lahan Perhutanan Sosial Responden Pesanggem di Desa Sidaurip dan Rawa Apu, 1990.

Kelompok Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Responden Pesanggem			
	Desa Sidaurip		Desa Rawa Apu	
	Orang	%	Orang	%
0,01 - 0,24	2	10	4	20
0,25 - 0,49	8	40	11	55
0,50 - 0,99	7	35	2	10
1,00 - 1,99	1	5	1	5
2,00	2	10	2	10
Jumlah	20	100	20	100
Rata-rata	0,64		0,54	

Sumber : Data Primer

Tabel Lampiran 9. Tingkat Pendapatan Awal (Tanpa Lahan Perhutanan Sosial) Per Kapita Rumah tangga Responden Pesanggem di Desa Sidaurip dan Rawa Apu (Setara Beras), 1990

Kelompok Tingkat Pendapatan (Kg Beras)	Jumlah Responden Pesanggem			
	Desa Sidaurip		Desa Rawa Apu	
	Orang	%	Orang	%
320 (Miskin)	5	(25)	9	(35)
320 - 480 (Cukup)	2	(10)	6	(30)
480 (Kaya)	13	(65)	5	(25)
Jumlah	20	(100)	20	(100)

Tabel Lampiran 10. Tingkat Pendapatan (Dengan Lahan Perhutanan Sosial) Per Kapita Rumah tangga Responden Pesanggem di Desa Sidaurip dan Rawa Apu (Setara Beras), 1990

Kelompok Tingkat Pendapatan (Kg Beras)	Jumlah Responden Pesanggem			
	Desa Sidaurip		Desa Rawa Apu	
	Orang	%	Orang	%
320 (Miskin)	1	(5)	7	(35)
320 - 480 (Cukup)	1	(5)	8	(40)
480 (Kaya)	18	(90)	5	(25)
Jumlah	20	(100)	20	(100)

Keterangan : Angka dalam () menunjukkan persen.

Tabel Lampiran 11. Hasil Panen Insus Tumpangsari Berdasarkan Ubinan 2,50 x 2,50 m Di Lahan Perhutanan Sosial untuk Musim Tanam 1989 - 1990.

RPH	Petak	Luas Insus (Ha)	Hasil Gabah Kering Panen (Ton/Ha)	Keterangan
Rawa Apu	2	213,20	2,176	Yang tidak panen seluas 121,42 Ha, karena tanaman mati
Cikujang	6	205,00	2,972	Yang tidak panen seluas 106,90 Ha, karena tanaman mati
	7	96,00	3,220	Yang tidak panen seluas 35,25 Ha, Karena tanaman mati
Cisumur	11	95,00	4,570	Yang tidak panen seluas 12,52 Ha, karena tanaman mati
Ciawilayan	9	24,00	7,752	-
	19	115,00	7,909	-
	20	158,00	7,548	-

Sumber : Arsip pada BKPH Rawa Barat.

